ORIGINALITY REPORT

17%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	ikom.fisip.untan.ac.id Internet	200 words — 1%
2	jurmafis.untan.ac.id Internet	102 words — 1%
3	dspace.uii.ac.id Internet	75 words — < 1%
4	repo.apmd.ac.id Internet	66 words — < 1%
5	text-id.123dok.com Internet	62 words — < 1%
6	gtzsfdm.or.id Internet	56 words — < 1%
7	jurnal.unismabekasi.ac.id Internet	56 words — < 1%
8	repository.umsu.ac.id Internet	56 words — < 1%
9	Rinita Rinita, Yuliarti Yuliarti. "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nagari Kamang Kabupaten Sijunjung", Al-DYAS, 2026 Crossref	53 words — < 1%
10	www.coursehero.com Internet	53 words — < 1%
11	repository.uin-suska.ac.id Internet	48 words — < 1%
12	repository.unhas.ac.id Internet	47 words — < 1%
13	digilib.ulm.ac.id Internet	46 words — < 1%

RELASI KUASA ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SIANTAN HILIR PONTIANAK UTARA

Program Studi Pembangunan Sosial

Oleh:
RISTA AMANDA
NIM. E1022211012

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

RELASI KUASA ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SIANTAN HILIR PONTIANAK UTARA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Jurusan Sosiologi
Prodi Pembangunan Sosial

Oleh :
Rista Amanda
NIM. E1022211012

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PENGESAHAN

RELASI KUASA ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SIANTAN HILIR PONTIANAK UTARA

Tanggung Jawab Yuridis Pada

Rista Amanda
NIM. E1022211012

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Indah Listyaningrum, S. Sos., M S.i
NIP. 198304302005012001

Tanggal : 11 Juni 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Reiki Nauli Harahap, S. Sos., M. A
NIP. 199411012022031008

Tanggal : 29 April 2026

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

RELASI KUASA ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SIANTAN HILIR PONTIANAK UTARA

Oleh :

RistaAmanda
NIM. E1022211012

Dipertahankan di	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal	: Rabu, 08 Juli 2026
Waktu	: 10.00 – 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang 2

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Indah Istiyaningrum. Sos., M.S	Reiki Nauli Harahap, Sos., MA
NIP. 198304302005012001	NIP. 199411012022031008
Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. H. Mukhlis, M.Si	Nurwijayanto, SH, M.Si
NIP. 196311121989031002	NIP.196700182007011002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Rista Amanda (E1022211012) : Relasi Kuasa Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Siantan Hilir Pontanak Utara. Skripsi. **Program Studi Pembangunan Sosial. Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura Pontianak. 2026.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan, serta rendahnya partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dinamika relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan di Kelurahan Siantan Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Informan penelitian meliputi perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat bersifat dinamis dan relatif terbuka melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta komunikasi yang terjalin antara kedua pihak. Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, namun pemerintah tetap memiliki peran dominan dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme administratif dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi ketimpangan relasi kuasa, seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, serta keterbatasan anggaran pembangunan. Berdasarkan analisis menggunakan teori relasi kuasa, ditemukan bahwa kekuasaan dalam pembangunan tidak hanya terpusat, tetapi tersebar dalam berbagai praktik sosial yang memengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan, serta pola komunikasi yang lebih kolaboratif guna menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Relasi Kuasa, Partisipasi masyarakat, Pembangunan desa.

ABSTRACT

Rista Amanda (E1022211012): Power Relations Between Government and Community in Development in Siantan Hilir Village, North Pontianak. Undergraduate Thesis. Social Development Study Program. Faculty of Social and Political Sciences. Tanjungpura University Pontianak. 2026.

This research was motivated by the inequality of power relations between the government and the community in the development process, as well as the low level of community participation at the village level. This research aimed to analyze the forms and dynamics of power relations between the government and the community in the development process in Siantan Hilir Village. This research employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, documentation, and field observation. Research informants included village officials, community leaders, and the general public. The results showed that the power relations between the government and the community were dynamic and relatively open through the Development Planning Deliberation (Musrenbang) forum as well as communication that occurred between the two parties. The community had space to convey aspirations, but the government still had a dominant role in the decision-making process through administrative mechanisms and resource management. In addition, there were several factors that influence the inequality of power relations, such as limited access to information, low participation of some community members, and limited development budgets. Based on analysis using power relations theory, it was found that power in development was not only centralized, but was dispersed in various social practices that affected the relationship between the government and the community. Therefore, it is necessary to strengthen community participation, policy transparency, and more collaborative communication patterns in order to create more inclusive and sustainable development.

Keywords: *Power Relations, Community Participation, Village Development.*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "*Relasi Kuasa Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Siantan Hilir*". Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta kuatnya dominasi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi melemahkan prinsip pembangunan partisipatif di Kelurahan Siantan Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dinamika relasi kuasa serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali fenomena secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan aparatur kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat sebagai informan. Analisis data menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Teori relasi kuasa dari Michel Foucault digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis. Kekuasaan dipahami tidak hanya sebagai sesuatu yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi juga sebagai sesuatu yang beroperasi dalam jaringan hubungan sosial. Relasi kuasa tidak selalu bersifat netral karena dapat membentuk pola dominasi yang terselubung dalam praktik pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat, seperti forum musyawarah (Musrenbang), secara formal telah tersedia. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa ruang partisipasi tersebut lebih bersifat prosedural daripada substantif. Aspirasi masyarakat seringkali hanya menjadi pelengkap dalam proses perencanaan tanpa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir. Dominasi pemerintah terlihat jelas dalam kontrol terhadap agenda pembangunan, distribusi informasi, serta pengelolaan anggaran. Posisi masyarakat cenderung berada pada tingkat penerima kebijakan, bukan sebagai aktor yang memiliki daya tawar yang setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi kuasa yang terjadi masih bersifat hierarkis dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi yang ideal. Beberapa faktor yang memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat meliputi keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas dan kesadaran partisipatif masyarakat, serta keterbatasan anggaran yang dijadikan alasan dalam penentuan prioritas pembangunan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan adanya struktur kekuasaan yang belum sepenuhnya terbuka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan masih didominasi oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat belum mampu berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif. Perbaikan diperlukan melalui peningkatan transparansi, penguatan kapasitas masyarakat, serta pembukaan ruang partisipasi yang lebih bermakna agar pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Rista Amanda
Nomor Mahasiswa	:	E1022211012
Program Studi	:	Pembangunan Sosial
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 08 Juli 2026
Yang membuat pernyataan



Rista Amanda
NIM. E1022211012

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, penulisan skripsi yang berjudul 'Relasi Kuasa Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Siantan Hilir Pontianak Utara' ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari akan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena penulisan ini merupakan langkah awal bagi penulis menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Indah Listyaningrum, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Utama dan Bapak Reiki Nauli Harahap, S. Sos., MA selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta memotivasi selama proses penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Mukhlis, M.Si selaku Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi penulis.
3. Bapak Nurwijayanto, S.H., M.Si selaku Dosen Penguji Kedua sekaligus Koordinator Program Studi Pembangunan Sosial dan Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi penulis.

4. Bapak/Ibu Dosen, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga beserta Staff Tata Usaha Dan Akademik yang bertugas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
5. Kelurahan Siantan Hilir, Serta Tokoh Masyarakat Siantan Hilir . Maupun masyarakat Umum Siantn Hilir yang telah menjadi informan pada penelitian ini.
6. Seluruh pihak-pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

Semoga segala kebaiakan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi semua pihak yang memerlukannya, Aamiin.

Pontianak, 08 Juli 2026

Rista Amanda
E1022211012

HALAMAN PESEMBAHAN

MOTTO

Allah tidak pernah berkata semuanya mudah, tapi dua kali Allah menegaskan bahwa :

“ Fa inna ma'al-'usri yusrā, nna ma'al-'usri yusrā.”

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah 94:5-6)

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT karena atas berkat limpahan dan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Orang tua saya, Bapak Syarifik Daria S.Sos dan Ibu Paridayati S.Pd, karena telah merawat, memotivasi dan membimbing saya selama hidup di dunia ini, serta selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan yang tidak dapat saya balas.
3. Kepada abang kandung saya, Ferdy Rifaldi Pratama S.I.P yang telah mendukung serta penyemangat selama saya hidup.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **iv**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR ..... **vii**
HALAMAN PESEMBAHAN ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian **1**
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian **7**
1.3 Fokus Penelitian **7**
1.4 Rumusan Masalah **8**
1.5 Tujuan Penelitian **8**
1.6 Manfaat Penelitian **8**
1.6.1 Manfaat Penelitian **8**
1.6.2 Manfaat Praktis **9**
1.6.3 Bagi Mahasiswa **9**
1.6.4 Bagi Masyarakat **9**
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
2.1 Definisi Konsep Penelitian. **10**
2.1.1 Konsep Pembangunan **10**
2.1.2 Konsep Pemerintahan Kelurahan **13**
2.1.3 Konsep Masyarakat dan Komunitas **14**
2.2 Kajian Teori Penelitian **15**
2.2.1 Teori Relasi Kuasa (Michel Foucault) **15**
2.3 Hasil Penelitian Relevan **19**
2.4 Alur Pikir Penelitian **22**

BAB III METODE PENELITIAN 24
3.1 Jenis Penelitian 24
3.2 Langkah – Langkah Penelitian 24
3.2.1 Pra Survey 24
3.2.2 Penyusunan Outline 25
3.2.3 Penyusunan Usulan Penelitian 25
3.2.4 Seminar 25
3.2.5 Penelitian Lapangan 26
3.2.6 Penyusunan Laporan 26
3.2.7 Ujian Skripsi 26
3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 26
3.3.1 Lokasi Penelitian 26
3.3.2 Waktu Penelitian 27
3.4 Subjek Penelitian 28
3.5 Objek Penelitian 29
3.6 Teknik Pengumpulan Data 30
3.6.1 Wawancara (*Interview*) 30
3.6.2 Dokumentasi 30
3.7 Instrumen Penelitian 30
3.7.1 Pedoman Wawancara 30
3.7.2 Alat Dokumentasi 31
3.8 Analisis Data 31
3.8.1 Pengumpulan Data 31
3.8.2 Reduksi Data (*Data Reduction*) 31
3.8.3 Penyajian Data (*Display Data*) 32
3.8.4 Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing / Verification) 32
3.9 Keabsahan Data 32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 34
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Siantan Hiir 34
4.2 Kondisi Geografis Kelurahan Siantan Hilir 35
4.2.1 Letak Wilayah 35
4.2.2 Batas Wilayah 36

4.3 Kondisi Demografis dan Sosial Kelurahan Siantan Hilir 37
4.3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Siantan Hilir Berdasarkan Jenis dan Usia 37
4.3.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Siantan Hilir Berdasarkan Agama 38
4.3.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Siantan Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan 39
4.3.4 Jumlah Penduduk Siantan Hilir Berdasarkan Mata Pencaharian 41
4.4 Sarana Prasarana 42
4.5 Struktur Kelurahan Siantan Hilir 44
4.6 Kondisi Ekonomi dan Infrastruktur Kelurahan Siantan Hilir 44
4.7 Profil Informal 48
4.7.1 Perangkat Kelurahan 48
4.7.2 Tokoh Masyarakat 49
4.7.3 Masyarakat Umum 49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 50
5.1 Hasil Penelitian 50
5.1.1 Bentuk dan Dinamika Relasi Kuasa antara Pemerintah dan Masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir 50
5.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Relasi Kuasa antara Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat 75
5.2 Pembahasan Penelitian 81
5.2.1 Bentuk dan Dinamika Relasi Kuasa antara Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir 82
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 91
6.1 Kesimpulan 91
6.2 Saran 92
6.3 Keterbatasan Penelitian 93
DAFTAR PUSTAKA 95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan Indonesia(2022-2024)..... 1
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Pontianak Utara (2023-2024) 3
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 2025-2026..... 28
Tabel 3. 2 Subjek Penelitian..... 29
Tabel 4. 1 Jumlah penduduk rentang 2024 – 2025 37
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rentang Usia 38
Tabel 4. 3 Penduduk Siantan Hilir Berdasarkan Agama Tahun 2024-2025..... 39
Tabel 4. 4 Pendidikan Penduduk Siantan Hilir Tahun 2024-2025 40
Tabel 4. 5 Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Siantan Hilir 41
Tabel 4.6 Sarana Prasarana Kelurahan Siantan Hilir.....46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Alur Pikir Penelitian 23
Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Pontianak utara 35
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kelurahan Siantan Hilir 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 99
Lampiran 2 Surat Tugas 101
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian 103

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan serius dalam proses pembangunan nasional yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut pemerintah untuk mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta lapangan pekerjaan yang memadai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari 273,5 juta jiwa pada 2022 menjadi 277,5 juta jiwa pada 2024. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan dari 9,54% pada 2022 menjadi 9,03% pada 2024(Badan Pusat Statistik: 2022, 2023 , 2024). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan Indonesia (2022-2024)

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk (juta jiwa)
2023 (Maret)	9,03%	275,8
2024 (September)	8,57%	277,7
2025 (Maret)	8,47%	280,2

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023,2024,2025)

Mengacu pada tabel 1.1 dapat dijelaskan secara empiris bahwa, pada Maret 2023 tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03%, menurun dari tahun sebelumnya, artinya, sekitar 90,97% penduduk tergolong tidak miskin. Pada September 2024, angka kemiskinan kembali turun menjadi 8,57%, dengan distribusi kesejahteraan sebagai berikut: kelompok miskin 8,57%; rentan miskin 24,42%; menuju kelas menengah 49,29%; kelas menengah 17,25%; dan kelas atas 0,46%. Sementara pada Maret 2025, persentase penduduk miskin

menurun lagi menjadi 8,47%, yang berarti sekitar 91,53% penduduk tergolong tidak miskin.

Terkait analisis ini, kategori “tidak miskin” didefinisikan sebagai kebalikan dari persentase kemiskinan (100% – persentase miskin). Namun, BPS juga menekankan pentingnya memperhatikan kelompok *rentan miskin*, yakni mereka yang secara statistik belum termasuk miskin tetapi berisiko tinggi jatuh miskin akibat perubahan sosial-ekonomi. Artinya, tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh sejauh mana mereka memiliki akses terhadap kebijakan publik, layanan dasar, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Berangkat dari perirtiwa diatas, memperlihatkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk setiap tahun, angka kemiskinan justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dan keberhasilan sebagian program pemerintah, seperti subsidi sosial, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Meski demikian, angka kemiskinan yang masih berada di atas 9% memperlihatkan bahwa pembangunan nasional belum sepenuhnya inklusif. Pertumbuhan penduduk yang cepat masih menjadi tantangan serius karena berpotensi menambah tekanan terhadap penyediaan kebutuhan dasar dan menimbulkan ketimpangan antarwilayah. Seperti yang dikemukakan (Rohmadiani & Swara, 2024), kemiskinan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga dengan dimensi sosial, demografi, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pembangunan nasional perlu diarahkan pada strategi yang lebih

holistik agar pertumbuhan ekonomi dapat disertai dengan pemerataan kesejahteraan (Ida Ayu Meisthya, 2024).

Kondisi serupa juga dapat dilihat di tingkat daerah. Kecamatan Pontianak Utara sebagai salah satu wilayah administratif Kota Pontianak terdiri dari empat kelurahan, yaitu Siantan Hulu, Siantan Hilir, Siantan Tengah, dan Batu Layang. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah ini meningkat dari sekitar 112 ribu jiwa pada 2022 menjadi hampir 116 ribu jiwa pada 2024 (Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2023; 2024). Walaupun secara umum tingkat kemiskinan Kalimantan Barat menurun dari 6,8% pada 2022 menjadi 6,25% pada 2024 (Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2024), kondisi di tingkat kelurahan masih memperlihatkan kerentanan, terutama pada akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Pontianak Utara (2023-2024)

Kelurahan	Jumlah Penduduk			Kemiskinan		
	2022	2023	2024	2022	2024	2025
Siantan Hulu	± 30.500	± 30.900	± 31.200	6,8	6,6	6,3
Siantan Hilir	± 27.300	± 27.600	± 28.000	6,9	6,6	6,3
Siantan Tengah	± 26.800	± 27.100	± 27.500	7,0	6,7	6,4
Batu Layang	± 27.900	± 28.300	± 28.800	6,8	6,5	6,2

Sumber: BPS Kota Pontianak Utara (2023,2024), BPS Kalbar (2024)

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk pada seluruh kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara dalam tiga tahun terakhir. Kelurahan Siantan Hulu merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, sedangkan Siantan Tengah memiliki jumlah penduduk terendah. Dari sisi kemiskinan, meskipun angkanya cenderung menurun dari tahun ke tahun

mengikuti tren Provinsi Kalimantan Barat, nilai persentase masih berkisar antara 6,2–7,0%. Artinya, masih ada sebagian masyarakat yang rentan miskin terutama pada aspek akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Fakta ini mengindikasikan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih terarah di tingkat kelurahan agar kesejahteraan dapat meningkat secara merata.

Meskipun kemiskinan di tingkat nasional maupun daerah menunjukkan penurunan, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pembangunan di tingkat kelurahan. Salah satu indikator lemahnya pembangunan berbasis komunitas adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan. Fenomena ini tampak nyata di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, yang meskipun mengalami peningkatan jumlah penduduk dari ±27.300 jiwa pada 2022 menjadi ±28.000 jiwa pada 2024, namun tingkat keterlibatan warganya dalam kegiatan pembangunan masih relatif rendah (Badan Pusat Statistik Pontianak Utara, 2023; 2024).

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. (Adpenalia & Sumarto, 2025) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyediaan infrastruktur desa masih rendah, di mana proses pengambilan keputusan lebih banyak didominasi oleh aparat desa dibandingkan warga. Temuan ini diperkuat oleh (Tonga, 2025) dalam studinya di Desa Tengkajau, Kabupaten Melawi, yang mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam

musyawarah pembangunan belum optimal sehingga aspirasi warga kurang terakomodasi.

Demikian pula (Markus, 2025) dalam penelitiannya di Desa Setungkup, Kalimantan Barat, menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan air bersih masih lemah. Dengan demikian, rendahnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir sejalan dengan fenomena yang terjadi di berbagai desa di Kalimantan Barat, dan hal ini menjadi tantangan serius bagi efektivitas pembangunan berbasis komunitas.

Pembangunan berbasis komunitas merupakan pendekatan yang menempatkan warga dan organisasi lokal sebagai pelaku utama dalam setiap tahap pembangunan mulai dari perumusan masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya publik agar hasil pembangunan lebih sesuai kebutuhan, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Model pembangunan ini terbukti efektif dalam memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan keterlibatan warga di tingkat akar rumput (South et al., 2019). Berkaitan dengan hal tersebut, di Kelurahan Siantan Hilir, Pontianak Utara, relevansi pendekatan ini terlihat dari bagaimana hubungan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat mempengaruhi arah serta efektivitas pembangunan. Relasi kuasa di tingkat lokal menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan, siapa yang memiliki akses terhadap informasi dan sumber daya, serta bagaimana mekanisme akuntabilitas berlangsung. Jika kekuasaan terlalu terpusat pada birokrat atau elit lokal tanpa partisipasi warga,

maka pembangunan cenderung bersifat top-down dan tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat. Sebaliknya, apabila hubungan kuasa bersifat kolaboratif dan transparan, pembangunan menjadi lebih adaptif dan pemerataan manfaatnya dapat terjamin.

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara relasi kekuasaan yang kuat dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Studi tentang *community-driven development* (CDD) menunjukkan bahwa ketika masyarakat memiliki ruang untuk menentukan prioritas pembangunan dan mengawasi pelaksanaannya dengan media berupa relasi terhadap penguasa, maka pendapatan rumah tangga meningkat, ketahanan pangan membaik, dan pemerataan pembangunan infrastruktur manfaat lebih terjaga (Sutisna & Qibthiyyah, 2023). Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan distribusi kekuasaan dan partisipasi warga kerap gagal mencapai hasil berkelanjutan. Dengan demikian, keseimbangan relasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan di tingkat local.

Partisipasi masyarakat memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan pembangunan. Pertama, partisipasi meningkatkan relevansi program karena kebijakan yang disusun berdasarkan aspirasi warga lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Kedua, keterlibatan masyarakat memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah, sehingga mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan transparansi kebijakan. Ketiga, partisipasi aktif membangun kapasitas sosial dan organisasi di tingkat lokal yang mendorong keberlanjutan program ketika dukungan eksternal berkurang. Keempat,

hubungan kekuasaan yang lebih setara antara pemerintah dan masyarakat membantu menekan ketimpangan hasil pembangunan serta memastikan distribusi manfaat yang lebih adil (Ramcilovic-Suominen & Kotilainen, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa, pembangunan di Kelurahan Siantan Hilir perlu dilihat bukan sekadar sebagai proses administratif, melainkan sebagai arena sosial-politik di mana relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat menentukan arah, proses, dan hasil pembangunan. Penelitian ini penting untuk menelusuri sejauh mana masyarakat memiliki ruang aktual dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta bagaimana dinamika relasi kekuasaan tersebut memengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang muncul dan akan dijadikan fokus dalam penelitian berikutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kelurahan Siantan Hilir.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat kelurahan Siantan Hilir menjadi indikator lemahnya pembangunan berbasis komunitas.

1.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi permasalahan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan sasaran penelitian semakin jelas maka penulis memfokuskan masalah pada “Relasi

Kuasa Antara Pemerintah Kelurahan Siantan Hilir dan Masyarakat dalam Pembangunan di Keluarahan Siantan Hilir".

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus Penelitian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Relasi Kuasa Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan di Keluarahan Siantan Hilir?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Menganalisis bentuk dan dinamika relasi kuasa antara pemerintah kelurahan Siantan Hilir dan masyarakat di Keluarahan Siantan Hilir.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan relasi kuasa yang terjadi antara pemerintah kelurahan Siantan Hilir dan masyarakat di Keluarahan Siantan Hilir.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini memiliki manfaat sebagai pembanding antara fakta dengan teori yang dipelajari di bangku perkuliahan sehingga penulis sebagai mahasiswa juga dapat memahami bagaimana pengaplikasian teori di lapangan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari sebuah penelitian merupakan bentuk kebermanfaatan penelitian dalam pemecahan masalah sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai sumber ilmiah bagi semua pihak. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1.6.3 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru terutama berkenaan dengan relasi kuasa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal di Kelurahan Siantan Hilir.

1.6.4 Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat menyampaikan pandangan dan pemikiran yang dapat dijadikan bahan pembanding bagi yang membutuhkan referensi untuk penelitian serupa.